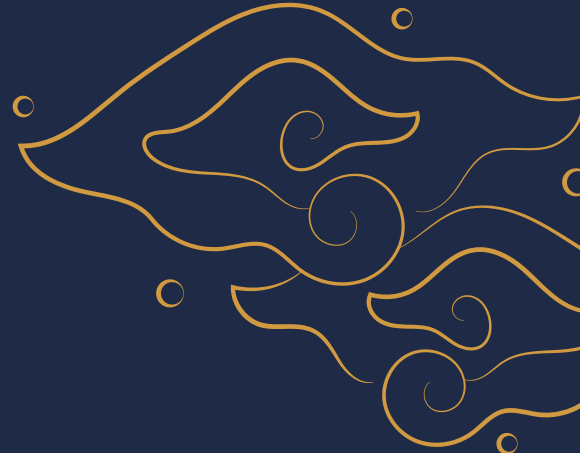
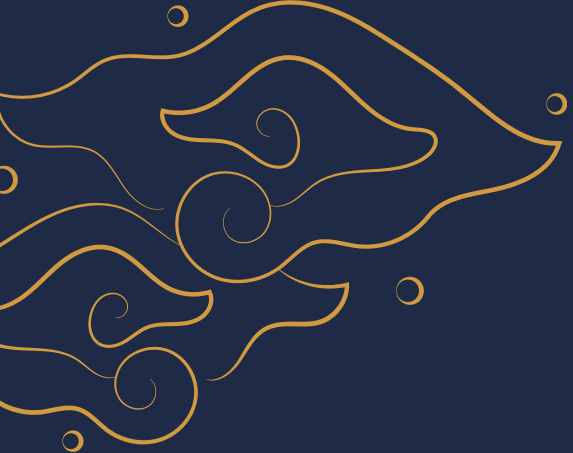




Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

LKJIP



DINAS SOSIAL
KABUPATEN BLITAR



TAHUN ANGGARAN 2023



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah diucapkan ke hadirat Allah SWT, karena atas izin dan kesempatan yang diberikan-Nya jugalah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini pada dasarnya merupakan laporan yang menggambarkan sejauh mana pencapaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2023. Sasaran strategis mengacu pada dokumen perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini juga digambarkan mengenai tugas dan wewenang, Renstra Dinas Sosial, Perjanjian Kinerja, target, pengukuran kinerja dan sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Blitar. Adapun penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini didasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta sesuai dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.

Sebagai sebuah laporan, tentunya tidak luput dari kekurangan. Karena itu diharapkan masukan dan saran untuk perbaikan ke depan. Demikianlah laporan ini disusun dan disampaikan, atas segala perhatiannya diucapkan terimakasih.

Blitar, 25 Januari 2024
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS SOSIAL
TAVIP WIYONO, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650311 199703 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Wewenang	1
C. Sumber Daya Perangkat Daerah	3
D. Isu-Isu Strategis	4
E. Sistematika Penulisan	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial	6
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. Capaian Kinerja Organisasi	13
B. Realisasi Anggaran	25
BAB IV PENUTUP	40
A. Kesimpulan	40
B. Langkah yang Akan Datang	40

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2023 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Blitar merupakan suatu rencana jangka menengah tahun 2021 – 2026 yang sangat menentukan dalam meningkatkan kinerja Dinas Sosial dengan urusan Sosial. Pada tahun 2023 mendapat alokasi dari dana APBD sebesar Rp. 15.473.271.350,00 (Lima Belas Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Anggaran ini terdiri dari Belanja Operasi yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja bantuan sosial.

Anggaran tahun 2023 di alokasikan untuk pelaksanaan 6 Program, 14 kegiatan dan 41 Sub Kegiatan. Total realisasi belanja Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 khususnya yang terkait dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebesar Rp. 13.331.677.230,00 (Tiga Belas Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah). Jumlah tersebut mencapai 86 % dari anggaran yang telah ditetapkan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*), sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlunya adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan semua pihak yang dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai cita-cita bangsa dan Negara.

Kesuksesan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan tergantung dari kesempurnaan aparatur pemerintah dan dukungan instansi terkait yang mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda tapi tetap menjadi satu dalam menyukseskan pembangunan. Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, maka terhadap pelaporan yang menyangkut Kinerja Instansi Pemerintah, disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2023.

B. Tugas dan Wewenang

Sesuai dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 101 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial terdiri dari:

a. Kepala Dinas:

Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang sosial.

b. Sekretariat terdiri dari:

1) Sekretaris

Mempunyai tugas mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, keuangan, kepegawaian, program dan pelaporan Dinas.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, serta informasi publik Dinas.

3) Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari:

1) Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan jaminan sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah.

2) Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari:

1) Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Rehabilitasi Sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

2) Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari:

1) Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

Mempunyai tugas membantu kepala dinas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

2) Kelompok Jabatan Fungsional

f. Bidang Penanganan Bencana, terdiri dari:

1) Kepala Bidang Penanganan Bencana

Mempunyai tugas membantu kepala dinas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanganan Bencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

2) Kelompok Jabatan Fungsional.

C. Sumber Daya Perangkat Daerah

Saat ini pegawai Dinas Sosial Kabupaten Blitar terdiri dari 32 ASN dan 14 Tenaga Harian Lepas, secara Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi) Eselon terdiri 1 orang Kepala Dinas, 1 orang Sekretaris Dinas, 4 orang Kepala Bidang dan seluruh staf. Berdasarkan Tingkat Pendidikannya Dinas Sosial dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL 1.1

Komposisi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jabatan Struktural

Eselon	Jumlah
II	1
III	4
Pelaksana	Jumlah
Gol IV	7 orang
Gol III	24 orang
Gol II	1 orang

TABEL 1.2**Sumber Daya Manusia Dinas Sosial berdasarkan Pendidikan**

No	Pendidikan	Jumlah (orang)
	PNS	
1	S2 (Pasca Sarjana)	7
2	S1 (Sarjana)	20
3	Diploma IV	1
4	Diploma III	3
5	SLTA	1
	Jumlah PNS	32
	Tenaga Harian Lepas	
1	S1 (Sarjana)	9
2	Diploma III	-
3	SLTA	5
	Jumlah THL	14

Beberapa diklat teknis yang telah diikuti oleh aparatur dalam upaya peningkatan keahlian dan kompetensi SDM. Diklat dimaksud meliputi antara lain Diklat Fungsional, Diklat Pim, dan Diklat Pengadaan Barang dan Jasa.

D. Isu-isu Strategis

Isu-isu Strategis yang berkaitan dengan Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

1. Belum terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial bagi pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
2. Belum optimalnya bantuan tanggap darurat bencana
3. Belum optimalnya peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan PPKS
4. Masih terbatasnya ketersediaan data yang valid dan *up to date* di berbagai bidang untuk kepentingan pembangunan
5. Masih diperlukan nilai-nilai kesetiakawanan sosial

6. Sarana prasarana yang terbatas dalam penanganan PPKS
7. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia/aparatur di Dinas Sosial.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dan garis besar isi dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi latar belakang, Tugas dan Wewenang, Sumber Daya Perangkat Daerah, Isu-isu Strategis serta sistematika Penulisan LKjIP.

BAB II : Perencanaan dan Perjanjian Kerja

Memuat tentang Rencana Strategis Dinas Sosial serta Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023.

BAB III : Akuntabilitas Kinerja

Memuat tentang Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja, Hasil Pengukuran Kinerja, Analisis dan Capaian Kinerja, dan Realisasi Tahun 2023.

BAB IV : Penutup

Membahas Kesimpulan dan Langkah-Langkah Peningkatan di masa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial

Terselenggaranya *Good Governance* yang merupakan persyaratan bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita pemerintah dan masyarakat Kabupaten Blitar. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem perencanaan yang tepat, jelas dan *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berhasil guna dan berdaya guna.

Perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang dilaksanakan dalam rangka menentukan tindakan yang ingin dilakukan di masa depan secara tepat melalui penetapan urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Pada saat ini perencanaan pembangunan ditata ke dalam suatu sistem perencanaan pembangunan nasional, secara yuridis dikukuhkan melalui Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Menurut kedua undang-undang tersebut sistem perencanaan pembangunan nasional adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan yang dibagi atas rencana jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara di tingkat Pusat dan Daerah.

Di dalam penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Blitar berkomitmen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang mengacu pada amanat yang tertuang Undang-undang nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2021-2026 ini secara operasional dijabarkan ke dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD). Di mana Dinas Sosial mendukung Misi ke-1 Bupati Blitar yaitu Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Blitar berlandaskan iman dan takwa dengan kearifan lokal budaya.

Adapun muatan yang terkandung dalam Renstra Dinas Sosial adalah visi, misi, kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing selama lima tahun ke depan.

Program kegiatan tersebut tentunya merupakan pelaksanaan sebagian kebijakan dan program Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJM Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026. Di samping itu tetap mengacu kepada RPJPD, RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJM Nasional.

Renstra Dinas Sosial dibangun berdasarkan komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder. Renstra Dinas Sosial sebagai dokumen perencanaan jangka menengah untuk dituangkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan, Renja Dinas Sosial, RKA Dinas Sosial dan APBD.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas sosial Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023, maka dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang yang telah dilimpahkan pada Dinas Sosial sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026.

Perjanjian kinerja tahun 2023 ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang merupakan bentuk komitmen antara Kepala Dinas Sosial selaku kepala organisasi yang bertanggung jawab atas program-program kerja yang sudah ditetapkan dengan Bupati selaku Kepala Daerah. Penetapan Kinerja Dinas Sosial Tahun 2023 berisi tentang sasaran dan Indikator Kinerja Utama yang menjadi target pada tahun anggaran 2023. Secara keseluruhan program, kegiatan dan sub kegiatan di DPPA Dinas Sosial Tahun 2023 diuraikan 6 program , 14 kegiatan dan 41 Sub Kegiatan yang menjadi tugas Dinas Sosial selama tahun 2023.

TABEL 2.1
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

SKPD : Dinas Sosial Kabupaten Blitar

Tahun : 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Menurunnya angka PMKS	Persentase penurunan angka PMKS	11,51%

TABEL 2.2
Jumlah Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Total Anggaran
Dinas Sosial

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
DINAS SOSIAL	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.037.864.271
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.044.600
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.522.300
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.522.300
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.731.736.350
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.695.493.350
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36.243.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	948.863.867
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.874.567
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	37.253.800
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.866.500
Fasilitasi Kunjungan Tamu	28.415.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	759.454.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	457.606.200
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	457.606.200
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	608.527.966
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85.276.986

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	513.250.980
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	288.085.288
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	187.795.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.110.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.180.288
Program Pemberdayaan Sosial	1.664.065.200
Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.240.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	2.240.000
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.661.825.200
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	16.936.000
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	203.595.100
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.432.974.100
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	8.320.000
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	4.360.000
Pemulangan Warga Negara Migran Korban	4.360.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	4.360.000
Program Rehabilitasi Sosial	296.935.900
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	189.562.900
Penyediaan Permakanan	56.945.000
Penyediaan Sandang	5.000.000
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	79.517.900
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	2.350.000
Pemberian Layanan Kedaruratan	35.750.000
Pemberian Layanan Rujukan	10.000.000
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	107.373.000
Penyediaan Permakanan	75.000.000
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	9.620.000
Pemberian Layanan Rujukan	12.393.000
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam	10.360.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	6.924.981.979
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	6.924.981.979
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	416.931.277
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	6.427.490.702
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	80.560.000
Program Penanganan Bencana	545.064.000
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	259.162.000
Penyediaan Makanan	247.162.000
Penyediaan Sandang	5.950.000
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	2.000.000
Pelayanan Dukungan Psikososial	4.050.000
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	285.902.000
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	17.700.000
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	268.202.000
TOTAL	15.473.271.350

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja organisasi diukur dengan melalui metodologi yang digunakan untuk membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dari indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, menggunakan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan (berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) sebagaimana tabel berikut :

TABEL 3.1
Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1.	91% - 100%	Sangat Tinggi
2.	76% - 90%	Tinggi
3.	66% - 75%	Sedang
4.	51% - 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Blitar disusun seperti tabel berikut :

TABEL 3.2

Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PREDIKAT
1.	Menurunnya angka PMKS	Persentase penurunan angka PMKS	11,51%	9,19%	120%	Sangat Tinggi

Uraian capaian Kinerja dari Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Blitar ditunjukkan dalam tabel berikut:

TABEL 3.3

Sasaran Strategis

No	Indikator Kinerja	Target Awal RPJMD	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Ket
1.	Menurunnya angka PMKS	11,76	11,62	11,30	11,51	9,19	

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial menurut jenisnya permasalahannya merupakan data yang menjabarkan /mewujudkan mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial yang meliputi kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku,

korban bencana dan korban tindak kekerasan, eksploitasi dan deskriminalisasi. Jumlah Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Blitar adalah 110.288 orang (Sumber data dari pendataan PPKS Tahun 2023 Dinas Sosial Kabupaten Blitar).

Data PPKS di Kabupaten Blitar tahun 2023 dijabarkan sebagai berikut:

TABEL 3.4
Data PPKS di Kabupaten Blitar Tahun 2023

NO	JENIS PPKS	JUMLAH (orang)
1.	Keluarga fakir miskin	104.666
2.	Anak jalanan	1
3.	Tuna susila	0
4.	Pengemis	0
5.	Gelandangan	25
6.	Balita Terlantar	2
7.	Anak Terlantar	3
8.	Anak Berhadapan dengan Hukum	66
9.	Penyandang Disabilitas (Anak)	
	a) Cacat tubuh	109
	b) Cacat netra	21
	c) Cacat rungu wicara	61
	d) Cacat mental	266
	e) Cacat ganda	51
10.	Anak Korban Tindak Kekerasan/ yang Diperlakukan Salah	5
11.	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	1
12.	Lanjut Usia Terlantar	37
13.	Penyandang Disabilitas dan Penyakit Kronis	
	a) Cacat tubuh	1.097
	b) Cacat netra	251
	c) Cacat rungu wicara	441

NO	JENIS PPKS	JUMLAH (orang)
	d) Cacat mental	2.143
	e) Cacat ganda	142
14.	Pemulung	25
15.	Kelompok Minoritas	27
16.	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	29
17.	Orang Dengan HIV/AIDS	0
18.	Korban Penyalahgunaan NAPZA	21
19.	Korban Trafficking	0
20.	Orang Korban Tindak Kekerasan / Diperlakukan Salah	0
21.	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	22
22.	Korban Bencana Alam	539
23.	Korban Bencana Sosial	140
24.	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	88
25.	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	1
26.	Komunitas Adat Terpencil	0
Jumlah		110.288

Dinas Sosial Kabupaten Blitar pada tahun 2023 menangani PPKS yang terdiri dari:

1. Lanjut Usia Terlantar

Lanjut Usia terlantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor- faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Pada Tahun 2023 Dinas Sosial Kabupaten Blitar untuk Lansia Terlantar dan lansia tidak potensial diberikan bantuan berupa :

Permakanan lansia, permakanan lansia adalah bantuan yang diberikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan bagi lanjut usia terlantar dan lanjut usia tidak potensial yang diberikan dalam bentuk makanan siap saji yang penganggarannya dilakukan oleh APBN melalui

program Kementerian Sosial RI. Dinas Sosial Kabupaten Blitar bertugas memfasilitasi kegiatan tersebut kepada penerima manfaat. Sebanyak 5.524 penerima bantuan permakanaan yakni lanjut usia yang terlantar secara ekonomi.

Selain itu, penanganan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar secara fisik / *homeless* adalah rehabilitasi sosial pada kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.

2. Anak yang berhadapan dengan hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Program yang mendukung kegiatan anak yang berhadapan dengan hukum adalah Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga. Tujuan kegiatan ini untuk memberikan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan Hukum baik anak pelaku, korban dan saksi. Kegiatan ini berbentuk asesmen awal setelah adanya laporan pendampingan saat pemeriksaan di kepolisian, pendampingan tahap II di Kejaksaan, pendampingan di pengadilan serta monitoring dan pembinaan lanjut terhadap ABH.

3. Penyandang Disabilitas

Penyandang Disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental dan sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Pada tahun 2023 Dinas Sosial Kabupaten

Blitar memfasilitasi bantuan kepada penyandang disabilitas berupa alat bantu bagi penyandang Disabilitas dan monitoring dan penjangkauan Penyandang Disabilitas dari Kementerian Sosial RI dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

a. Alat bantu bagi penyandang disabilitas

Kegiatan pemberian bantuan bagi penyandang disabilitas bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap penyandang disabilitas agar dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih baik. Pada tahun 2023 alat bantu bagi penyandang disabilitas berupa 11 unit alat bantu dengar, 5 unit kruk, 1 unit kursi roda cerebral palsy, 1 unit kursi roda multiguna, 30 unit kursi roda standar, 37 unit tongkat netra adaptif, serta sebanyak 124 orang menerima bantuan sosial berupa uang melalui program ATENSI Kementerian Sosial RI.

b. Monitoring dan penjangkauan Penyandang Disabilitas

Kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) kepada penyandang disabilitas yang menerima pelatihan tahun anggaran 2023 dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan ke Panti Rehabilitasi Sosial.

Kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) kepada penyandang disabilitas yang mendapatkan pelatihan tahun anggaran 2023 dilakukan untuk mengetahui perkembangan bantuan yang diterima bagi penyandang disabilitas, sedangkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan ke panti rehabilitasi sosial dilakukan untuk mengirim klien yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan atau rehabilitasi sosial di panti yang telah ditentukan sesuai dengan keadaan fisik maupun mental klien. Panti rehabilitasi sosial yang dimaksud adalah Panti Rehabilitasi Sosial sebagai UPT dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

4. Anak Terlantar

Anak Terlantar adalah seorang Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga. Kriterianya adalah berasal dari keluarga

fakir miskin, anak yang dilalaikan oleh orang tua dan anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Penyebab utama persoalan anak terlantar adalah keterbatasan ekonomi keluarga dan berbagai masalah lainnya.

Pada tahun 2023 untuk anak terlantar kegiatannya adalah aksesibilitas/ pengiriman anak terlantar yang akan mengikuti pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja ke panti- panti sosial yang ada di Jawa Timur, kegiatan ini targetnya adalah agar meningkatkan keterampilan dan kemandirian anak terlantar/ putus sekolah yang ada di Kabupaten Blitar. Pengiriman anak terlantar ke panti sosial di antaranya ke UPT PSBR Jombang dan UPT PSBR Blitar.

5. Fakir Miskin

Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya dengan kriteria tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan / atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Berikut merupakan bantuan sosial yang diberikan kepada fakir miskin di tahun 2023.

TABEL 3.5

Bantuan Sosial yang Disalurkan kepada Fakir Miskin di Kabupaten Blitar pada Tahun 2023

NO	JENIS BANSOS	PERIODE PENYALURAN	PENERIMA		KETERANGAN
1.	PKH (Program Keluarga Harapan)	Tahap 1	46.606	KPM	BNI / APBN
			1.167	KPM	PT POS/ APBN
		Tahap 2	46.138	KPM	BNI / APBN
			1.874	KPM	PT POS/ APBN
		Tahap 3	2.389	KPM	PT POS/ APBN
		Juli - Agustus	44.067	KPM	BNI / APBN
		September - Oktober	43.517	KPM	BNI / APBN
		Oktober - Desember	2.809	KPM	PT POS/ APBN
		November - Desember	43.418	KPM	BNI / APBN

NO	JENIS BANSOS	PERIODE PENYALURAN	PENERIMA		KETERANGAN
2.	BPNT/ BSP (Program Sembako)	Januari - Februari	74.669	KPM	BNI / APBN
		Januari - Maret	3.203	KPM	PT POS/ APBN
		Maret - April	81.795	KPM	BNI / APBN
		April - Juni	3.536	KPM	PT POS/ APBN
		Mei - Juni	80.313	KPM	BNI / APBN
		Juli - Agustus	80.238	KPM	BNI / APBN
		Juli - September	4.951	KPM	PT POS/ APBN
		September - Oktober	79.514	KPM	BNI / APBN
		Oktober - Desember	6.095	KPM	PT POS/ APBN
		November - Desember	79.383	KPM	BNI / APBN
3.	Bantuan Pangan CPP berupa beras	Juli - September	275	KPM	PT POS/ APBN
		Maret	95.294	KPM	BULOG & PT YASA/ APBN
		April	95.294	KPM	BULOG & PT YASA/ APBN
		Mei	95.294	KPM	BULOG & PT YASA/ APBN
		September	93.016	KPM	BULOG & PT YASA/ APBN
		Oktober	93.016	KPM	BULOG & PT YASA/ APBN
		November	93.016	KPM	BULOG & PT YASA/ APBN
		Desember	93.016	KPM	BULOG & PT YASA/ APBN
4.	Paket Bantuan Sembako yang diberikan kepada masyarakat (OVOP, fakir miskin, dll)	Tambahan 1,2,3 (Desember)	3.102	KPM	BULOG & PT YASA/ APBN
		Januari	90	ORG	DINSOS/ APBD
		Februari	60	ORG	DINSOS/ APBD
		Maret	49	ORG	DINSOS/ APBD
		April	15	ORG	DINSOS/ APBD
		Mei	110	ORG	DINSOS/ APBD
		Juni	64	ORG	DINSOS/ APBD
		Juli	155	ORG	DINSOS/ APBD
		Agustus	18	ORG	DINSOS/ APBD
		September	46	ORG	DINSOS/ APBD
		Oktober	155	ORG	DINSOS/ APBD
		November	184	ORG	DINSOS/ APBD
		Desember	493	ORG	DINSOS/ APBD
5.	Penerima PBID	Januari	77.621	ORG	BPJS/ APBD
		Februari	77.621	ORG	BPJS/ APBD
		Maret	77.621	ORG	BPJS/ APBD
		April	76.652	ORG	BPJS/ APBD
		Mei	76.035	ORG	BPJS/ APBD
		Juni	76.002	ORG	BPJS/ APBD
		Juli	76.102	ORG	BPJS/ APBD

NO	JENIS BANSOS	PERIODE PENYALURAN	PENERIMA		KETERANGAN
		Agustus	75.865	ORG	BPJS/ APBD
		September	72.772	ORG	BPJS/ APBD
		Oktober	73.657	ORG	BPJS/ APBD
		November	73.759	ORG	BPJS/ APBD
		Desember	73.842	ORG	BPJS/ APBD
6.	Penerima PBIN	Januari	399.150	ORG	BPJS/ APBN
		Februari	405.461	ORG	BPJS/ APBN
		Maret	406.026	ORG	BPJS/ APBN
		April	413.327	ORG	BPJS/ APBN
		Mei	413.396	ORG	BPJS/ APBN
		Juli	413.648	ORG	BPJS/ APBN
		Agustus	437.638	ORG	BPJS/ APBN
		September	443.421	ORG	BPJS/ APBN
		Oktober	442.953	ORG	BPJS/ APBN
		November	442.378	ORG	BPJS/ APBN
7.	Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT)	Mei	731	ORG	DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT)
		Juni	1.012	ORG	DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT)
		Juli	1.119	ORG	DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT)
		Agustus	1.323	ORG	DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT)
		September	1.529	ORG	DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT)
		Oktober	1.609	ORG	DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT)
		November	1.821	ORG	DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT)
		Desember	1.821	ORG	DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT)
8.	Iuran Jaminan Sosial	Juni	4.674	ORG	DINSOS/ APBD
		Juli	4.660	ORG	DINSOS/ APBD
		Agustus	4.660	ORG	DINSOS/ APBD

NO	JENIS BANSOS	PERIODE PENYALURAN	PENERIMA		KETERANGAN
	Ketenagakerjaan untuk Masyarakat Pekerja Rentan	September	5.217	ORG	DINSOS/ APBD
		Oktober	9.070	ORG	DINSOS/ APBD
		November	9.070	ORG	DINSOS/ APBD
		Desember	9.070	ORG	DINSOS/ APBD
9.	KUBE (Kelompok Usaha Bersama)	Juli	6	KLM	DINSOS/ APBD
10.	BLT Kemiskinan Ekstrem	November - Desember	1.450	ORG	DINSOS/ APBD

Usaha Ekonomi Produktif Fakir Miskin (UEP) merupakan sarana penunjang bagi pengembangan usaha yang dijalankan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial. UEP di Dinas Sosial Kabupaten Blitar berbentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Pada tahun 2023 Dinas Sosial memberikan bantuan UEP pada Fakir Miskin yang terealisasi kepada 43 orang atau 6 kelompok. Penerima berasal dari usulan/proposal keluarga penerima manfaat (KPM) yang KPM tersebut masuk dalam data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Tujuan dari kegiatan Usaha Ekonomi Produktif ini adalah:

1. Meningkatkan kemampuan masyarakat khususnya keluarga miskin dalam menjalankan usahanya.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya keluarga miskin melalui pemberian bantuan barang untuk modal usaha.
3. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab sosial masyarakat dalam penanganan fakir miskin.

Bantuan Usaha ekonomi produktif KUBE-FM berupa pemberian bantuan barang untuk pengembangan usaha, yang direncanakan kepada kelompok masyarakat. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan kelompok yang beranggotakan 10-15 orang yang didasari kedekatan tempat tinggal, jenis usaha atau keterampilan anggota, ketersediaan sumber daya alam/geografis, latar belakang kehidupan budaya yang sama, dan memiliki motivasi yang sama. KUBE diharuskan memiliki struktur organisasi yang jelas, semua anggota harus terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

(DTKS) dan setiap anggota hanya boleh berasal dari 1 (satu) Kartu Keluarga (KK).

Tahun 2023 Dinas Sosial memberikan bantuan untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebanyak 10 kelompok. Penerima bantuan KUBE tahun 2023 adalah:

- KUBE Mugi Rahayu di Desa Wates Kecamatan Wates dengan jenis usaha jahit dan bordir.
- KUBE Manunggal di Desa Tugurejo Kecamatan Wates dengan jenis usaha aneka kue basah.
- KUBE Mekar di Desa Tulungrejo Kecamatan Wates dengan jenis usaha aneka keripik singkong, pisang, ubi, tempe, dan kentang.
- KUBE Mawar di Desa Panggungduwet Kecamatan Kademangan dengan jenis usaha produksi gerabah.
- KUBE Batako Tawang Sari di Kelurahan Tawang Sari Kecamatan Garum dengan jenis usaha pembuatan batako dan paving.
- KUBE Guno Joyo di Desa Gondang Kecamatan Gandusari jenis usaha pembuatan pakan ternak.

6. Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial

Bencana Alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.

Korban Bencana Sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Pada tahun 2023 jumlah korban bencana yang ditangani adalah korban bencana sosial ledakan petasan di Dusun Sadengan Desa Karangbendo Kecamatan Pongkok sebanyak 101 orang. Bantuan yang diberikan Dinas Sosial kepada korban bencana adalah pemenuhan

kebutuhan dasar seperti pendirian Dapur Umum untuk menyediakan permakanan serta layanan dukungan psikososial yang diberikan oleh Taruna Siaga Bencana (TAGANA). Dalam penanganan bencana, Dinas Sosial bertugas untuk pendirian tenda pengungsian, evakuasi korban bencana, pendirian dapur umum, pemenuhan kebutuhan dasar, dan perlindungan psikososial.

Tujuan penyediaan makanan untuk korban bencana adalah:

1. Untuk terpenuhinya kebutuhan pangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari bagi korban bencana alam dan korban bencana sosial.
2. Tercukupinya gizi korban bencana alam dan sosial sehingga dapat meningkatkan imunitas untuk menghadapi kemungkinan berjangkitnya penyakit ketika berada dalam keadaan darurat.

Dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial, Dinas Sosial Kabupaten Blitar dibantu oleh Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

TABEL 3.6

Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

No.	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah
1.	Pekerja Sosial Profesional	1 orang
2.	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	89 orang
3.	Penyuluh Sosial Profesional	2 orang
4.	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	48 orang
5.	Tenaga Sosial Kesejahteraan Sosial (TKSK)	22 orang
6.	Pendamping Program Keluarga Harapan	128 orang
7.	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1 lembaga
8.	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	27 lembaga

B. Realisasi Anggaran

TABEL 3.7
Realisasi Anggaran Dinas Sosial

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PERUBAHAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	TARGET	PAGU ANGGARAN SETELAH PAK 2023	REALISASI 2023	SISA ANGGARAN	%
3	4	5	7	8	9	10
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	6.037.864.271	5.659.065.604	378.798.667	94%
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun</i>	100%	3.044.600	3.044.200	400	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	1.522.300	1.522.150	150	100%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	1.522.300	1.522.050	250	100%
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel</i>	100%	3.731.736.350	3.501.253.097	230.483.253	94%

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PERUBAHAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	TARGET	PAGU ANGGARAN SETELAH PAK 2023	REALISASI 2023	SISA ANGGARAN	%
3	4	5	7	8	9	10
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 orang/bulan	3.695.493.350	3.466.056.697	229.436.653	94%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 dokumen	36.243.000	35.196.400	1.046.600	97%
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100%	948.863.867	873.741.226	75.122.641	92%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	80.874.567	78.049.200	2.825.367	97%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	37.253.800	31.163.750	6.090.050	84%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	42.866.500	42.310.500	556.000	99%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	28.415.000	15.954.075	12.460.925	56%

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PERUBAHAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	TARGET	PAGU ANGGARAN SETELAH PAK 2023	REALISASI 2023	SISA ANGGARAN	%
3	4	5	7	8	9	10
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 laporan	759.454.000	706.263.701	53.190.299	93%
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	100%	457.606.200	421.660.000	35.946.200	92%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 unit	457.606.200	421.660.000	35.946.200	92%
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipenuhi</i>	100%	608.527.966	580.318.519	28.209.447	95%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	550 laporan	10.000.000	7.000.000	3.000.000	70%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	85.276.986	67.894.047	17.382.939	80%

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PERUBAHAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	TARGET	PAGU ANGGARAN SETELAH PAK 2023	REALISASI 2023	SISA ANGGARAN	%
3	4	5	7	8	9	10
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 laporan	513.250.980	505.424.472	7.826.508	98%
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara</i>	100%	288.085.288	279.048.562	9.036.726	97%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 unit	187.795.000	185.295.067	2.499.933	99%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	55.110.000	49.006.200	6.103.800	89%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	45.180.288	44.747.295	432.993	99%
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pemberdayaan Sosial di Masyarakat	100%	1.664.065.200	1.302.934.450	361.130.750	78%

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PERUBAHAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	TARGET	PAGU ANGGARAN SETELAH PAK 2023	REALISASI 2023	SISA ANGGARAN	%
3	4	5	7	8	9	10
<i>Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase Penyelenggara Pengelolaan Sumber Dana Sosial Yang Dibina Dan Dimonitoring Pelaksanaan Kegiatannya</i>	100%	2.240.000	2.155.000	85.000	96%
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	75 dokumen	2.240.000	2.155.000	85.000	96%
<i>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase Jenis Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten Yang Diberdayakan</i>	100%	1.661.825.200	1.300.779.450	361.045.750	78%
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	22 orang	16.936.000	15.441.800	1.494.200	91%

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PERUBAHAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	TARGET	PAGU ANGGARAN SETELAH PAK 2023	REALISASI 2023	SISA ANGGARAN	%
3	4	5	7	8	9	10
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	23 orang	203.595.100	185.140.200	18.454.900	91%
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	27 lembaga	1.432.974.100	1.091.877.450	341.096.650	76%
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	17 sertifikat	8.320.000	8.320.000	0	100%
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang di fasilitasi	100%	4.360.000	0	4.360.000	0%

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PERUBAHAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	TARGET	PAGU ANGGARAN SETELAH PAK 2023	REALISASI 2023	SISA ANGGARAN	%
3	4	5	7	8	9	10
<i>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk Dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal</i>	<i>Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang di fasilitasi</i>	100%	4.360.000	0	4.360.000	0%
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	4.360.000	0	4.360.000	0%
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	296.935.900	232.353.750	64.582.150	78%

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PERUBAHAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	TARGET	PAGU ANGGARAN SETELAH PAK 2023	REALISASI 2023	SISA ANGGARAN	%
3	4	5	7	8	9	10
<i>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</i>	<i>1. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau</i> <i>2. Persentase Layanan yang Diberikan Kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial sesuai standar teknis</i>	100%	189.562.900	138.583.750	50.979.150	73%
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	200 orang	56.945.000	55.544.250	1.400.750	98%

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PERUBAHAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	TARGET	PAGU ANGGARAN SETELAH PAK 2023	REALISASI 2023	SISA ANGGARAN	%
3	4	5	7	8	9	10
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	5.000.000	4.985.000	15.000	100%
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 orang	0	0	0	0%
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	40 orang	79.517.900	30.444.500	49.073.400	38%
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	2.350.000	2.240.000	110.000	95%

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PERUBAHAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	TARGET	PAGU ANGGARAN SETELAH PAK 2023	REALISASI 2023	SISA ANGGARAN	%
3	4	5	7	8	9	10
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	0	0	0	0%
Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	35.750.000	35.670.000	80.000	100%
Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	10.000.000	9.700.000	300.000	97%
<i>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</i>	<i>Jumlah Jenis Layanan Rehabilitasi Yang Diberikan Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</i>	100%	107.373.000	93.770.000	13.603.000	87%

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PERUBAHAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	TARGET	PAGU ANGGARAN SETELAH PAK 2023	REALISASI 2023	SISA ANGGARAN	%
3	4	5	7	8	9	10
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	75.000.000	65.970.000	9.030.000	88%
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	9.620.000	9.400.000	220.000	98%
Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	0	0	0	0%
Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 orang	12.393.000	8.160.000	4.233.000	66%

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PERUBAHAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	TARGET	PAGU ANGGARAN SETELAH PAK 2023	REALISASI 2023	SISA ANGGARAN	%
3	4	5	7	8	9	10
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2 dokumen	10.360.000	10.240.000	120.000	99%
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase penerima PKH (Program Keluarga Harapan), PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran - Jaminan Kesehatan), dan BSP (Bantuan Sosial Pangan) yang difasilitasi	100%	6.924.981.979	5.726.719.426	1.198.262.553	83%
<i>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase DTKS, PBI-JK dan PMKS yang divalidasi Dan diverifikasi</i>	100%	6.924.981.979	5.726.719.426	1.198.262.553	83%
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	562076 orang	416.931.277	378.511.326	38.419.951	91%

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PERUBAHAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	TARGET	PAGU ANGGARAN SETELAH PAK 2023	REALISASI 2023	SISA ANGGARAN	%
3	4	5	7	8	9	10
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	9600 keluarga	6.427.490.702	5.268.728.100	1.158.762.602	82%
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	80.560.000	79.480.000	1.080.000	99%
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100%	545.064.000	410.604.000	134.460.000	75%
<i>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase Korban Bencana Yang Mendapat Perlindungan Dan Pemulihan Pasca Bencana</i>	100%	259.162.000	204.504.000	54.658.000	79%

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PERUBAHAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	TARGET	PAGU ANGGARAN SETELAH PAK 2023	REALISASI 2023	SISA ANGGARAN	%
3	4	5	7	8	9	10
Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 orang	247.162.000	192.504.000	54.658.000	78%
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	5.950.000	5.950.000	0	100%
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	2.000.000	2.000.000	0	100%
Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	4.050.000	4.050.000	0	100%

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PERUBAHAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	TARGET	PAGU ANGGARAN SETELAH PAK 2023	REALISASI 2023	SISA ANGGARAN	%
3	4	5	7	8	9	10
<i>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase Masyarakat yang terlibat aktif dalam Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten</i>	100%	285.902.000	206.100.000	79.802.000	72%
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	4 kampung	17.700.000	10.155.000	7.545.000	57%
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	40 orang	268.202.000	195.945.000	72.257.000	73%
TOTAL			15.473.271.350	13.331.677.230	2.141.594.120	86%

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dinas Sosial Kabupaten Blitar merupakan OPD utama/ pendukung pelaksanaan urusan sosial. Pada anggaran perubahan tahun 2023 Dinas Sosial melaksanakan 6 program, 14 kegiatan dan 41 Sub Kegiatan. Untuk melaksanakan kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp 15.473.271.350,00 dan terealisasi sebanyak Rp 13.331.677.230,00 atau sebesar 86% dari total anggaran yang ditetapkan.

Dari Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Blitar yaitu Menurunnya Angka PPKS dapat diketahui bahwa Dinas Sosial Kabupaten Blitar telah berhasil menurunkan 2,11% angka PPKS dari tahun sebelumnya. Persentase PPKS di Kabupaten Blitar saat ini adalah 9,19% atau 110.288 orang yang terdata dan ditangani di tahun 2023.

B. Langkah yang Akan Datang

Berpedoman kepada Indikator Kinerja Dinas Sosial semua target terlaksana dengan baik, sehingga untuk masa yang akan datang untuk dapat dipertahankan pencapaiannya. Untuk masa yang akan datang pelaksanaan kegiatan menpedomani dan memperhatikan persoalan/kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial sesuai dengan kewenangan atau diamanahkan oleh Perundang-Undangan yang berlaku dapat diambil langkah-langkah yang akan datang.

Dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan perlu pemahaman dan sinergitas untuk pencapaian target dan sasaran-sasaran yang akan dicapai. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan oleh Dinas Sosial Kabupaten Blitar, dapat dicapai lebih maksimal ketika didukung oleh beberapa hal seperti, dukungan sarana dan prasarana, dukungan anggaran, Sumber Daya Manusia. Selain itu hal lain yang perlu dilakukan adalah perlunya koordinasi lintas sektor terkait dengan program dan kegiatan. Hal ini tidak hanya menjadi sasaran dari satu OPD namun dapat didukung oleh OPD

terkait lainnya. Sebagai salah satu contoh, penanganan Anak Terlantar bisa juga dilakukan oleh OPD yang mengampu urusan perempuan dan anak, serta banyak lagi OPD yang bisa terlibat akan penanganan persoalan terkait, sehingga diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang tercapai target dan sasarannya secara maksimal.

